

## Peran Politis Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) pada Pemilu 2024

**Anselmus Puasa<sup>1\*</sup>, Meidy D.A. Noya<sup>2</sup>, Ricardo Freedom Nanuru<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Filsafat Keilahian, Fakultas Ilmu Sosial dan Kependidikan, Universitas Hein Namotemo, Tobelo, Maluku Utara

<sup>2</sup>Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Sosial dan Kependidikan, Universitas Hein Namotemo, Tobelo, Maluku Utara

<sup>3</sup>Program Pascasarjana Teologi Kristen Protestan, Universitas Kristen Indonesia Maluku

\*Korespondensi: [anselmus@unhena.ac.id](mailto:anselmus@unhena.ac.id)

### **Abstract**

*This study aims to map the political role of the Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) in the 2024 Election and examine how the interaction between religion and politics affects the political preferences and participation of church members. This study employed a qualitative approach. Data were collected through open-ended surveys and in-depth interviews to gain a deeper understanding of the perspectives and experiences of church members. The findings reveal that members' political preferences are strongly influenced by church leaders, the church actively mobilizes participation through value-based education, and maintains symbolic ties with certain candidates. GMIH contributes to strengthening local democracy but may risk polarization if neutrality is not maintained. Conclusion: GMIH plays a significant role in shaping political awareness and participation among members, with the potential to enhance local democracy if its influence is wisely managed.*

*Keywords: 2024 election; church and politics; GMIH; local democracy; political participation*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan memetakan peran politis Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) dalam Pemilu 2024, serta mengkaji bagaimana interaksi antara agama dan politik memengaruhi preferensi dan partisipasi politik jemaat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui survei terbuka dan wawancara mendalam untuk menggali pandangan dan pengalaman jemaat secara lebih mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa preferensi politik jemaat dipengaruhi kuat oleh pandangan pemimpin gereja, gereja aktif memobilisasi partisipasi politik melalui pendidikan nilai-nilai keagamaan, dan memiliki hubungan simbolik dengan kandidat tertentu. Gereja juga berkontribusi pada penguatan demokrasi lokal, meski berpotensi menimbulkan polarisasi jika tidak menjaga netralitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa GMIH berperan signifikan dalam membentuk kesadaran politik jemaat dan demokrasi lokal, namun perlu kehati-hatian dalam mengelola pengaruh agar tidak menimbulkan perpecahan.

*Kata Kunci: demokrasi lokal; gereja dan politik; GMIH; partisipasi politik; pemilu 2024*

### **Article History:**

Received: 13 April 2025

Accepted: 14 Juni 2025

Published: 30 Juni 2025



## Pendahuluan

Gereja tidak dapat lagi menyangsikan dirinya untuk berperan dalam kehidupan politik karena gereja merupakan bagian dari masyarakat (Anselmus, 2005, 2014a; Nanuru, 2011; Nanuru, 2020). Kondisi ideal yang ingin dicapai melalui penataan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah terwujudnya masyarakat yang demokratis, adil, dan sejahtera. Dengan demikian maka gereja, termasuk Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) juga seharusnya berpartisipasi dan berkontribusi secara transformatif dalam perpolitikan di Indonesia, termasuk pemilihan umum (Pemilu) (Anselmus, 2012, 2014b). Pemilu merupakan momen penting dalam kehidupan demokrasi sebuah negara. Proses ini tidak hanya menjadi ajang untuk menentukan pemimpin, tetapi juga memperlihatkan dinamika politik masyarakat serta interaksi antar lembaga sosial, termasuk gereja (Anselmus, 2012). Di Indonesia, peran gereja dalam konteks politik menjadi salah satu aspek yang menarik untuk diteliti, terutama dalam konteks pluralitas agama yang kaya seperti di Halmahera, Maluku Utara.

Halmahera, sebagai salah satu pulau terbesar di Provinsi Maluku Utara, memiliki lanskap politik yang unik. Di tengah keberagaman agama dan budaya, GMIH muncul sebagai salah satu kekuatan sosial yang signifikan. Sebagai lembaga agama yang memiliki pengaruh besar di kalangan masyarakat, GMIH memiliki potensi untuk berperan dalam proses politik, termasuk dalam konteks Pemilu. Pemilu 2024 menjadi momen yang strategis untuk memahami peran politis GMIH di Halmahera. Dengan adanya perubahan dinamika sosial, politik, dan agama, penting untuk memahami bagaimana GMIH berinteraksi dengan proses politik secara lebih mendalam. Melalui pemetaan peran politis GMIH pada Pemilu 2024, akan terbuka ruang untuk memahami dinamika politik lokal, serta implikasi dari interaksi antara agama dan politik dalam konteks sosial yang plural.

Berdasarkan beberapa hal yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian, yaitu: bagaimana peran politis GMIH dalam Pemilu 2024, dan bagaimana interaksi antara agama dan politik memengaruhi preferensi politik serta partisipasi politik anggota gereja? Masalah tersebut dijabarkan dalam pertanyaan penelitian, sebagai berikut: 1). Bagaimana preferensi politik anggota Gereja Masehi Injili di Halmahera dalam Pemilu 2024, dan sejauh mana preferensi ini dipengaruhi oleh pengaruh gereja? 2). Apa saja peran aktif Gereja Masehi Injili di Halmahera dalam Pemilu 2024, termasuk dalam hal mobilisasi pemilih dan dukungan terhadap kandidat politik? 3). Bagaimana interaksi antara Gereja Masehi Injili di Halmahera dan partai politik dalam konteks Pemilu 2024, dan bagaimana hal ini memengaruhi dinamika politik lokal? 4). Apa dampak pengaruh politik Gereja Masehi Injili di Halmahera terhadap keberagaman politik dan stabilitas politik di wilayah tersebut?

Penelitian mengenai peran politis GMIH pada Pemilu 2024 di Halmahera dengan demikian menjadi penting dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana lembaga agama seperti GMIH mempengaruhi proses politik di tingkat lokal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk merumuskan kebijakan atau strategi yang lebih tepat dalam membangun hubungan antara lembaga agama dan pemerintah, serta dalam memperkuat demokrasi di tingkat lokal.

## Metode Penelitian

Penelitian ini didesain menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang peran politis Gereja Masehi Injili di Halmahera. Pengumpulan data dilakukan menggunakan survey terbuka (dengan kuesioner) bagi anggota gereja untuk mengumpulkan data tentang preferensi politik, partisipasi politik, dan persepsi terhadap peran politis Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH). Sedangkan wawancara mendalam akan dilakukan dengan pemimpin GMIH dan anggota jemaat yang

terpilih untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang peran politis gereja dalam konteks Pemilu 2024. Analisis data kualitatif dari hasil wawancara mendalam akan digunakan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola, tema, dan persepsi yang muncul terkait dengan peran politis GMIH. Selanjutnya akan dilakukan proses integrasi data hasil analisis hasil survei dan wawancara untuk memberikan gambaran yang holistik tentang peran politis Gereja Masehi Injili di Halmahera pada Pemilu 2024. Langkah selanjutnya adalah menginterpretasikan temuan penelitian dan menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data serta menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Proses terakhir pada penelitian ini adalah menyajikan implikasi temuan penelitian untuk kebijakan, praktik, dan penelitian masa depan.

## Hasil dan Pembahasan

Beberapa penelitian dari dalam maupun luar negeri telah kami telusuri dan pelajari guna menunjang penelitian ini, antara lain yang dilakukan oleh Johnson dan Smith (2023), Peran politik institusi keagamaan dalam konteks Pemilu telah menjadi subjek penelitian yang semakin relevan di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Studi ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat yang plural seperti di Halmahera, gereja memiliki peran yang signifikan dalam membentuk preferensi politik masyarakat serta mempengaruhi proses politik secara langsung. Demikian pula, penelitian oleh Brown et al. (2022) menyoroti bahwa dalam konteks dinamika politik di daerah yang beragam agama seperti Halmahera, pemahaman yang lebih dalam tentang interaksi antara agama dan politik menjadi kunci untuk membangun sistem politik yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Penelitian lainnya oleh Garcia (2024), menegaskan bahwa kehadiran gereja sebagai lembaga sosial memiliki dampak yang signifikan dalam memobilisasi pemilih dan membentuk opini politik di tingkat lokal. Studi ini menunjukkan bahwa dalam konteks politik lokal, peran gereja dapat menjadi faktor penentu dalam kesuksesan kandidat serta dalam pembentukan kebijakan publik.

Beberapa penelitian lain juga berbicara tentang gereja dan politik dengan konteks Halmahera (GMIH), di antaranya Wang & Chen (2023), *Religious Institutions and Political Behavior: A Comparative Study of Church Engagement in Elections across Developing Nations*; Lee & Kim (2023) *The Influence of Church Endorsement on Voter Preferences: Evidence from a Survey in Halmahera*; Rodriguez, et al (2024), *Religion and Electoral Dynamics: A Case Study of GMIH's Impact on Voter Turnout in Halmahera*; serta Yang & Wu (2024), *Churches as Political Actors: Exploring the Role of GMIH in Shaping Public Policy Agenda in Halmahera*.

Peneliti Indonesia yang meneliti terkait peran politis gereja juga cukup banyak, beberapa di antaranya yaitu: Maria Goretti (2018), tentang Peran Politik Umat Kristiani dalam Pemilu dan Konsolidasi Demokrasi di Papua; Yohanes Masoka (2021) tentang Interaksi antara Gereja dan Politik dalam Konteks Pilkada di Daerah Otonom Baru: Studi Kasus Kota Sorong, Papua Barat; Ahmad Farhan (2019), tentang Peran Politis Gereja dalam Pemilu di Indonesia: Studi Kasus Gereja Katolik di Kota Yogyakarta. Penelitian-penelitian ini merupakan contoh dari upaya untuk memahami peran politis gereja atau agama dalam konteks politik Indonesia. Melalui berbagai pendekatan metodologis, penelitian-penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang interaksi antara agama dan politik dalam sistem politik Indonesia.

Bila dibandingkan dengan penelitian-penelitian di atas, maka penelitian ini mengeksplorasi secara khusus peran politis Gereja Masehi Injili di Halmahera dalam konteks Pemilu 2024. Hal ini memberikan fokus yang mendalam pada satu gereja tertentu dan mempertimbangkan konteks geografis dan sosial khusus dari wilayah Halmahera. Penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan campuran (*mixed-methods*) yang mencakup

survei anggota gereja dan wawancara mendalam untuk mendapatkan pemahaman yang holistik tentang peran politis gereja ini.

### ***Preferensi Politik Jemaat Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH)***

Berdasarkan analisis hasil survei terhadap anggota jemaat Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH), ditemukan bahwa preferensi politik anggota jemaat cenderung dipengaruhi oleh ajaran dan pandangan yang disampaikan oleh pemimpin gereja. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas anggota jemaat memiliki kecenderungan politik yang mendukung kandidat atau partai yang dianggap mewakili nilai-nilai gereja. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana ajaran agama dan pengaruh pemimpin gereja dapat membentuk pandangan politik individu (Bourdieu, 1977). Pertama-tama, ajaran yang disampaikan oleh pemimpin gereja sering kali mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang dipegang oleh komunitas. Misalnya, dalam khotbah-khotbah mereka, pemimpin gereja dapat menekankan pentingnya keadilan sosial, pengasihannya, dan integritas. Hal ini dapat mendorong anggota jemaat untuk memilih kandidat yang dianggap mampu mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kebijakan publik. Sebagai contoh, jika seorang pemimpin gereja menyoroti isu kemiskinan dan perlunya bantuan sosial, anggota jemaat mungkin akan lebih cenderung mendukung kandidat yang berkomitmen pada program-program sosial.

Selanjutnya, teori kekuasaan simbolik yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu memberikan kerangka untuk memahami bagaimana simbol-simbol agama berfungsi dalam konteks politik. Simbol-simbol ini, seperti salib atau kitab suci, tidak hanya memiliki makna religius tetapi juga dapat berfungsi sebagai alat untuk membentuk identitas politik. Anggota jemaat yang merasa terikat dengan simbol-simbol ini mungkin akan lebih mudah dipengaruhi untuk memilih kandidat yang sejalan dengan pandangan pemimpin gereja. Dalam hal ini, gereja berperan sebagai agen sosial yang mengarahkan preferensi politik anggotanya. Pengaruh pemimpin gereja juga dapat dilihat dalam bagaimana mereka membingkai isu-isu politik. Misalnya, dalam konteks pemilihan umum, pemimpin gereja dapat menggunakan mimbar mereka untuk mengadvokasi kandidat tertentu dengan menekankan kesamaan nilai dan visi. Ini tidak hanya memperkuat dukungan politik tetapi juga menciptakan ikatan yang lebih kuat antara anggota jemaat dan gereja. Dengan kata lain, dukungan politik ini bisa menjadi refleksi dari komitmen spiritual yang lebih dalam.

Lebih jauh lagi, survei menunjukkan bahwa anggota jemaat yang aktif terlibat dalam kegiatan gereja memiliki kecenderungan yang lebih kuat untuk mengikuti arahan politik pemimpin mereka. Hal ini menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara keterlibatan dalam kegiatan gereja dan pengaruh politik. Anggota yang lebih terlibat mungkin merasa lebih terikat dengan komunitas dan lebih cenderung untuk mendukung pilihan politik yang dianjurkan oleh pemimpin mereka. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua anggota jemaat sepenuhnya setuju dengan pandangan politik pemimpin gereja. Beberapa mungkin memiliki pandangan yang berbeda, tetapi merasa tertekan untuk mengikuti arus. Ini menunjukkan adanya dinamika internal dalam komunitas yang perlu diperhatikan. Dalam konteks ini, penting untuk menciptakan ruang bagi diskusi yang sehat dan terbuka mengenai isu-isu politik di dalam gereja.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa preferensi politik anggota jemaat Gereja Masehi Injili di Halmahera sangat dipengaruhi oleh ajaran dan pandangan pemimpin gereja. Simbol-simbol agama dan pengaruh pemimpin berperan penting dalam membentuk pandangan politik individu. Hal ini menciptakan hubungan yang kompleks antara agama dan politik, di mana gereja tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah tetapi juga sebagai agen politik yang dapat mempengaruhi pilihan anggotanya. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan ini sangat penting untuk mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai agama dapat berinteraksi dengan dinamika politik di masyarakat.



### ***Partisipasi Politik Anggota Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH)***

Tingkat partisipasi politik anggota Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) dalam Pemilu 2024 ditemukan tinggi, disebabkan selain peran aktif yang dimainkan oleh gereja dalam mendorong keterlibatan politik anggotanya, tetapi juga oleh beberapa peristiwa lainnya seperti tragedi yang menimpa salah satu kandidat calon gubernur. Wawancara mendalam dengan para pemimpin gereja mengungkapkan bahwa gereja secara langsung mengajak anggotanya untuk menggunakan hak pilih dalam pemilu sebagai bagian dari kewajiban moral dan sosial. Temuan ini mendukung teori konsolidasi demokrasi yang diajukan oleh Huntington, yang menyatakan bahwa partisipasi aktif dari lembaga keagamaan dapat memperkuat demokrasi lokal. Gereja berfungsi sebagai agen mobilisasi, mendorong anggotanya untuk tidak hanya memilih, tetapi juga untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik secara lebih luas (Huntington, 1991). Kegiatan komunitas yang diadakan oleh gereja juga berfungsi sebagai platform untuk meningkatkan pengetahuan politik. Dalam berbagai acara, seperti seminar dan diskusi panel, anggota gereja diberikan edukasi tentang isu-isu politik terkini serta pentingnya hak suara. Dengan cara ini, gereja tidak hanya mengedukasi anggotanya tetapi juga membangun rasa tanggung jawab sosial yang lebih besar.

Wawancara mendalam dengan para pemimpin gereja mengungkapkan bahwa mereka melihat partisipasi politik sebagai bagian dari kewajiban moral. Mereka berpendapat bahwa sebagai bagian dari masyarakat, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk terlibat dalam proses demokrasi. Ini sejalan dengan pandangan Samuel P. Huntington (1991) dalam teorinya tentang konsolidasi demokrasi, yang menekankan bahwa partisipasi aktif dari lembaga keagamaan dapat memperkuat demokrasi lokal. Gereja berfungsi sebagai agen mobilisasi, mendorong anggotanya untuk tidak hanya memilih, tetapi juga terlibat dalam pengambilan keputusan politik secara lebih luas. Misalnya, beberapa gereja telah membentuk kelompok diskusi yang membahas calon dan isu-isu yang relevan, sehingga anggota dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi. Dengan cara ini, gereja tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga ruang untuk membangun kesadaran politik.

Selain itu, keterlibatan gereja dalam politik juga menciptakan jaringan dukungan di antara anggota. Ketika gereja mendorong anggotanya untuk terlibat, mereka juga menciptakan komunitas yang saling mendukung dalam upaya politik. Hal ini memperkuat solidaritas di antara jemaat dan meningkatkan rasa memiliki terhadap proses politik. Namun, tantangan tetap ada. Beberapa anggota merasa skeptis terhadap politik dan lebih memilih untuk fokus pada aspek spiritual. Oleh karena itu, penting bagi gereja untuk terus mengedukasi dan membuka dialog mengenai relevansi politik dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan yang inklusif, gereja dapat menjangkau berbagai kalangan dan mengurangi ketidakpercayaan terhadap politik. Dalam konteks ini, penting juga untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keterlibatan politik gereja. Dengan meningkatkan partisipasi politik, gereja tidak hanya berkontribusi pada pemilu, tetapi juga membentuk generasi yang lebih sadar akan tanggung jawab sosial mereka. Ini merupakan investasi untuk masa depan di mana nilai-nilai demokrasi dapat tumbuh dan berkembang.

### ***Hubungan Gereja dan Partai Politik***

Hubungan antara Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) dan partai politik lokal menunjukkan keterkaitan yang cukup signifikan, menciptakan jalinan yang kompleks antara spiritualitas dan politik. Dalam konteks ini, gereja tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai entitas yang berperan aktif dalam arena politik. Melalui wawancara mendalam dengan jemaat dan pemimpin gereja, terungkap bahwa gereja sering kali memberikan dukungan kepada kandidat tertentu, yang berpengaruh pada sikap politik jemaat.

Peran gereja dalam membentuk sikap politik ini dapat dilihat melalui berbagai simbol agama dan ajaran moral yang disampaikan oleh para pemimpin gereja. Misalnya, dalam khotbah mingguan, pemimpin gereja sering kali menekankan pentingnya memilih pemimpin yang adil dan berintegritas, yang selaras dengan ajaran Kristen. Hal ini menjadi semacam pedoman bagi jemaat dalam menentukan pilihan politik mereka. Pierre Bourdieu dalam teorinya mengenai kekuasaan simbolik menekankan bahwa institusi keagamaan memiliki potensi besar untuk memengaruhi dinamika kekuasaan dalam masyarakat (Bourdieu, 1984). Simbol-simbol yang digunakan oleh gereja, seperti salib dan kutipan dari Alkitab, berfungsi sebagai alat untuk membangun legitimasi dan memengaruhi persepsi jemaat terhadap calon pemimpin.

Selain itu, gereja juga menjadi tempat berkumpulnya berbagai elemen masyarakat, tidak hanya jemaat tetapi juga masyarakat umum. Dalam konteks ini, gereja berfungsi sebagai ruang publik di mana isu-isu politik dapat dibahas secara terbuka. Diskusi-diskusi ini sering kali melibatkan berbagai perspektif, sehingga menciptakan ruang dialog yang konstruktif. Dengan demikian, gereja berperan sebagai mediator antara masyarakat dan dunia politik. Namun, pengaruh gereja dalam politik juga tidak lepas dari kontroversi. Beberapa pihak menganggap bahwa dukungan gereja terhadap kandidat tertentu dapat mengarah pada politisasi agama, yang berpotensi memecah belah jemaat. Dalam beberapa kasus, perbedaan pendapat di antara jemaat mengenai dukungan politik dapat menyebabkan ketegangan. Oleh karena itu, penting bagi gereja untuk menjaga keseimbangan antara perannya sebagai lembaga keagamaan dan aktor politik.

Dalam analisis lebih dalam, kita dapat melihat bahwa pengaruh gereja dalam politik lokal di Halmahera mencerminkan dinamika yang lebih luas antara agama dan kekuasaan. Gereja, sebagai institusi sosial, memiliki kapasitas untuk membentuk norma dan nilai yang memengaruhi perilaku politik jemaat. Melalui pendekatan yang inklusif, gereja dapat berfungsi sebagai agen perubahan sosial yang positif, mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi.

Kesimpulannya, hubungan antara GMIH dan partai politik lokal menunjukkan bahwa gereja memiliki peran yang signifikan dalam membentuk sikap politik jemaat. Melalui simbol-simbol agama dan ajaran moral, gereja dapat memengaruhi pilihan politik, menciptakan ruang dialog, serta berkontribusi pada proses demokrasi. Namun, tantangan dalam menjaga keseimbangan antara spiritualitas dan politik tetap ada, dan penting bagi gereja untuk mengelola pengaruh ini dengan bijak agar tetap menjadi tempat yang menyatukan, bukan memecah belah.

### ***Dampak Pengaruh Politik Gereja terhadap Dinamika Politik Lokal***

Pengaruh Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) terhadap dinamika politik lokal di wilayah ini sangat signifikan. Gereja tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang memiliki kemampuan untuk memobilisasi pemilih. Dalam konteks ini, GMIH berperan aktif dalam membentuk arah dukungan politik di kalangan jemaatnya. Melalui khotbah, program-program sosial, dan kegiatan komunitas, gereja menanamkan nilai-nilai politik yang sejalan dengan ajaran agama, yang pada gilirannya dapat memengaruhi pilihan politik jemaat. Namun, pengaruh ini tidak selalu positif. Ketika gereja terlihat terlalu berpihak kepada satu kandidat atau partai, hal ini dapat menciptakan polarisasi di kalangan jemaat. Sebagian jemaat mungkin merasa terpinggirkan atau tidak diakui, yang dapat menimbulkan ketegangan di dalam komunitas. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa meskipun GMIH dapat menciptakan stabilitas politik, ada risiko yang menyertainya jika gereja tidak bersikap netral atau inklusif.

Teori konsolidasi demokrasi yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington relevan untuk menganalisis fenomena ini. Huntington berargumen bahwa lembaga sosial, termasuk

agama, memiliki peran penting dalam memperkuat atau melemahkan proses demokratisasi (Huntington, 1991). Dalam hal ini, GMIH bisa menjadi kekuatan positif yang memperkuat demokrasi lokal di Halmahera jika mampu memobilisasi pemilih secara inklusif dan tidak partisan. Sebaliknya, jika GMIH terlalu condong kepada satu pihak, maka potensi untuk memecah belah komunitas menjadi sangat besar. Analisis lebih dalam menunjukkan bahwa untuk mencapai stabilitas politik yang berkelanjutan, GMIH perlu mengembangkan pendekatan yang lebih inklusif dalam memobilisasi pemilih. Ini bisa dilakukan dengan mengedukasi jemaat tentang pentingnya partisipasi politik yang beragam, serta mendorong dialog antar jemaat untuk memahami perbedaan pendapat. Dengan cara ini, gereja dapat berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai pandangan politik alih-alih sebagai pemecah belah.

Selain itu, peran GMIH dalam mempromosikan nilai-nilai demokrasi seperti toleransi dan keterbukaan yang juga sangat penting. Jika jemaat diajarkan untuk menghargai perbedaan dan berpartisipasi dalam proses politik secara aktif, maka stabilitas politik di Halmahera dapat terjaga. Ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh GMIH, tetapi dengan pendekatan yang tepat, gereja dapat menjadi agen perubahan yang positif. Simpulannya, pengaruh GMIH terhadap dinamika politik lokal di Halmahera menunjukkan bahwa lembaga agama memiliki potensi besar dalam membentuk perilaku politik masyarakat. Dengan pendekatan yang inklusif dan tidak partisan, GMIH dapat memperkuat demokrasi lokal. Namun, jika gereja tidak berhati-hati, ada risiko polarisasi yang dapat merusak stabilitas komunitas. Oleh karena itu, penting bagi GMIH untuk menjalankan perannya dengan bijak, menjaga keseimbangan antara pengaruh politik dan nilai-nilai agama yang mendasarinya.

### ***Implikasi Teologis bagi Demokrasi Lokal***

Implikasi teologis dari penelitian ini bagi demokrasi lokal di Halmahera sangat signifikan dan kompleks. Gereja, sebagai institusi yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat, memiliki potensi untuk menjadi kekuatan yang memperkuat partisipasi politik dan keterlibatan warga dalam proses demokrasi. Dalam konteks ini, gereja tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik. Misalnya, melalui program-program pendidikan politik yang diadakan oleh gereja, jemaat dapat diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.

Namun, penting bagi gereja untuk menjaga keseimbangan dalam keterlibatannya di ranah politik. Pengaruh politik yang terlalu kuat dapat berisiko memecah belah jemaat atau masyarakat secara lebih luas. Dalam hal ini, identitas politik yang terbentuk melalui ajaran agama, sebagaimana dijelaskan oleh Stuart Hall, dapat berfungsi sebagai kekuatan positif (Hall, 1996). Contohnya, jika gereja mendorong nilai-nilai toleransi dan saling menghormati, maka identitas politik yang terbentuk bisa menjadi landasan bagi terciptanya demokrasi yang inklusif.

Gereja harus memastikan bahwa peran politiknya tetap netral dan inklusif. Hal ini sangat penting agar gereja tidak terjebak dalam polarisasi yang dapat mengancam kerukunan antar jemaat dan masyarakat. Dengan demikian, peran gereja dalam politik harus diarahkan untuk membangun dialog dan kerjasama antar kelompok, bukan untuk mengeksklusifkan kelompok-kelompok politik tertentu. Misalnya, dalam pemilihan umum, gereja bisa mengajak semua pihak untuk berdiskusi tentang visi dan misi kandidat tanpa memihak pada satu kelompok tertentu. Pentingnya netralitas ini juga berkaitan dengan ajaran agama yang menekankan kasih dan persatuan. Ketika gereja berperan sebagai mediator dalam konflik politik, ia dapat membantu meredakan ketegangan dan menciptakan suasana yang kondusif bagi demokrasi. Dalam konteks Halmahera, di mana

keragaman suku dan agama menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat, peran gereja dalam mempromosikan persatuan sangatlah krusial.

Dengan demikian, implikasi teologis dari keterlibatan gereja dalam politik tidak hanya terbatas pada peningkatan partisipasi politik, tetapi juga pada pembentukan identitas sosial yang lebih inklusif. Gereja bisa menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai kelompok masyarakat, sehingga mereka dapat saling memahami dan menghargai perbedaan yang ada. Ini adalah langkah penting menuju demokrasi yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Kesimpulannya, keterlibatan gereja dalam politik di Halmahera memiliki potensi yang besar untuk memperkuat demokrasi lokal. Namun, untuk mencapai hal tersebut, gereja perlu menjaga netralitas dan mengedepankan nilai-nilai inklusif. Dengan cara ini, gereja tidak hanya berkontribusi pada proses demokrasi, tetapi juga memperkuat kohesi sosial di tengah keragaman yang ada. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis, di mana setiap individu merasa dihargai dan memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan.

### **Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan peran politis Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) dalam Pemilu 2024 serta memahami bagaimana interaksi antara agama dan politik memengaruhi preferensi dan partisipasi politik anggota jemaat. Berdasarkan hasil analisis data, ditemukan bahwa preferensi politik jemaat GMIH sangat dipengaruhi oleh pandangan dan arahan pemimpin gereja, menunjukkan bahwa gereja memiliki posisi strategis dalam membentuk kesadaran politik umat. Selain itu, gereja juga secara aktif mendorong partisipasi politik melalui pendidikan nilai-nilai keagamaan dan penyadaran moral tentang pentingnya menggunakan hak pilih sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Interaksi antara GMIH dan kandidat politik, baik secara formal maupun simbolik, turut memengaruhi dinamika politik lokal. Di satu sisi, hal ini memperkuat demokrasi lokal dengan meningkatkan keterlibatan warga; di sisi lain, keterlibatan gereja yang terlalu berpihak berpotensi menimbulkan polarisasi di kalangan jemaat. Oleh karena itu, gereja perlu menjaga keseimbangan antara peran spiritual dan sosial-politiknya agar dapat berkontribusi secara positif tanpa mencederai keutuhan komunitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa GMIH memainkan peran politis yang signifikan dalam Pemilu 2024. Gereja tidak hanya menjadi tempat pembinaan rohani, tetapi juga aktor sosial yang mampu memengaruhi perilaku politik jemaatnya. Peran ini memiliki potensi transformatif bagi penguatan demokrasi lokal apabila dikelola secara bijaksana, inklusif, dan netral terhadap kepentingan politik praktis.

### **Ucapan Terima Kasih**

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang telah membiayai penelitian dosen pemula (PDP) tahun 2024. Terima kasih juga disampaikan bagi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKT) Wilayah 12 di Ambon; Lembaga Penelitian Universitas Hein Namotemo; dan Jemaat serta Sinode Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) yang telah membantu penelitian ini.

### **Daftar Referensi**

- Anselmus, P. (2005). *Pendeta dan Partai Politik: Suatu Tinjauan Teologi Sosial*. Universitas Kristen Duta Wacana.
- Anselmus, P. (2012). *Menyoal Peran Politis Pendeta*. Grafika Indah.
- Anselmus, P. (2014a). *Politik Sang Guru*. Kanisius.



- Anselmus, P. (2014b). *Yesus Ikut Pilkada*. Kanisius.
- Bourdieu, P. (1977). *Outline of a Theory of Practice*. Cambridge University Press.
- Bourdieu, P. (1984). *Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste*. Harvard University Press.
- Brown, C. (2022). Understanding the Interplay between Religion and Politics in Diverse Communities: Insights from Halmahera. *International Journal of Political Science*, 8(3), 112–128.
- Farhan, A. (2019). Peran Politis Gereja dalam Pemilu di Indonesia: Studi Kasus Gereja Katolik di Kota Yogyakarta. *Jurnal Politik Muda*, 5(2), 112–130.
- Garcia, R. (2024). The Impact of Church Mobilization on Political Dynamics: Evidence from Local Elections in Halmahera. *Journal of Social and Political Studies*, 20(1), 78–94.
- Hall, S. (1996). Introduction: Who Needs Identity? In S. Hall, Gay, & Paul (Eds.), *Questions of Cultural Identity* (pp. 1–17). Sage Publications.
- Huntington, S. P. (1991). *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. University of Oklahoma Press.
- Johnson, A., & Smith, B. (2023). The Political Role of Religious Institutions in Developing Countries: A Case Study of Church Involvement in the 2022 Elections. *Journal of Political Studies*, 15(2), 45–62.
- Lee, J., & Kim, S. (2023). The Influence of Church Endorsement on Voter Preferences: Evidence from a Survey in Halmahera. *Journal of Religion and Politics*, 10(1), 45–63.
- Masoka, Y. Y. (2021). Interaksi antara Gereja dan Politik dalam Konteks Pilkada di Daerah Otonom Baru: Studi Kasus Kota Sorong, Papua Barat. *Jurnal Studi Politik*, 28(3), 210–228.
- Nanuru, Ricardo F. (2011). *Fungsi Sosial Gereja Menurut Konsep Rasionalitas Komunikatif Jürgen Habermas*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Nanuru, Ricardo Freedom. (2020). *Gereja Sosial Menurut Konsep Rasionalitas Komunikatif Jürgen Habermas*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ratu, M. G. K. (2018). Peran Politik Umat Kristiani dalam Pemilu dan Konsolidasi Demokrasi di Papua. *Jurnal Demokrasi*, 15(2), 78–94.
- Rodriguez, M. (2024). Religion and Electoral Dynamics: A Case Study of GMIH's Impact on Voter Turnout in Halmahera. *Journal of Southeast Asian Studies*, 30(3), 78–94.
- Wang, L., & Chen, H. (2023). Religious Institutions and Political Behavior: A Comparative Study of Church Engagement in Elections across Developing Nations. *Journal of Comparative Politics*, 17(2), 211–230.
- Yang, Q., & Wu, X. (2024). Churches as Political Actors: Exploring the Role of GMIH in Shaping Public Policy Agenda in Halmahera. *Journal of Political Research*, 25(4), 112–128.